

BAB III

DUKUNGAN TURKI TERHADAP QATAR

TAHUN 2017

Pada bab ini akan menguraikan tentang dukungan Turki terhadap negara Qatar. Pembahasan akan diawali dengan pemaparan tentang deskripsi konflik diplomatic Qatar beserta negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar. Deskripsi lebih rinci terkait dukungan Turki terhadap Qatar dalam konflik diplomatik yang akan dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

A. Deskripsi Konflik

Qatar merupakan rumah bagi maskapai penerbangan global terkemuka, Qatar Airways. Pengangkut awalnya terkena dampak sengketa, dengan 18 tujuan tiba-tiba tidak terjangkau. Itu terpaksa membatalkan sekitar 50 penerbangan sehari, dikarenakan pada tanggal 5 Juni 2017 beberapa negara teluk secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. (Defterios, 2018). Negara-negara tersebut termasuk Negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Maladewa. Tidak lama setelah itu, Negara Yaman, Libya, Maladewa, Mauritius, dan Mauritania mengambil langkah serupa. Sementara Negara Yordania mengambil jalan yang sedikit berbeda. Tidak memutuskan, namun Negara Yordania *men-downgrade* hubungannya diplomatiknya dengan Negara Qatar. Pemutusan hubungan tersebut termasuk penarikan duta besar serta memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan.

Dua negara anggota Dewan Kerja sama Teluk, Kuwait dan Oman, tidak bergabung dengan sanksi yang dipelopori Negara Arab Saudi terhadap Qatar, di mana Negara Kuwait berusaha melakukan mediasi perundingan antara Qatar dan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan. Iran juga menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Negara Arab Saudi dan negara-negara lain juga mengkritik Al

Jazeera dan hubungan Qatar dengan Iran, serta menuduh Negara Qatar mendanai organisasi teroris. Negara Qatar membantah mendukung terorisme, mengingat bahwa pihaknya telah membantu Amerika Serikat dalam Perang melawan Terorisme dan intervensi militer terhadap NIIS yang sedang berlangsung. (Prastiwi, 2017)

Negara Turki, Rusia, dan Iran telah menyerukan untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara kedua Negara tersebut melalui dialog. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya mengkritik Qatar dan berpihak pada Negara Arab Saudi, namun sehari kemudian berbalik arah dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Emir Qatar untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka. (Barnard & Kirkpatrick, 2017)

Perwujudan kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah perwakilan diplomatik Yordania di Qatar dan mencabut izin TV *Al Jazeera*. Seluruh negara punya alasan serupa, seperti dikutip dari Kantor Berita Arab Saudi *SPA*, pemutusan hubungan diplomatik dilakukan untuk melindungi mereka dari terorisme dan ekstremisme. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Alasan terorisme mungkin sekadar naratif. Dikutip dari *Bloomberg*, deskriminasi Negara Arab Saudi terhadap Qatar terkait konflik lama pada 22 tahun lalu, tepatnya tahun 1995. Perseteruan itu terkait dengan gas alam yang dimiliki Qatar. (Lendon, 2017).

Kala itu, Hamad bin Khalifa Al Thani ayah emir Qatar saat ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melengserkan penguasa sebelumnya yang pro-Saudi. Beliau mengambil alih kekuasaan dari ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani, yang saat itu sedang berlibur di Jenewa. Pada saat bersamaan, negeri kecil di ujung sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab melakukan pengiriman perdana gas alam cair dari *reservoir* atau cadangan terbesar dunia di lepas pantai *North Field* yang luasnya setara dengan wilayah Qatar.

Qatar berbagi pengelolaan *North Field* dengan Iran, negara yang amat dibenci oleh Arab Saudi. Dari situlah, kedua tetangga itu memulai perang dingin. Cadangan gas alam dalam

jumlah besar itu tidak hanya mengubah Negara Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita tahunan mencapai US\$ 130 ribu, tapi juga menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Fokus Negara Qatar pada pengelolaan gas, membuat negara itu berjarak dengan negara tetangganya di *Gulf Cooperation Council* atau Dewan Kerja Sama Teluk yang menyandarkan perekonomiannya pada minyak bumi sekaligus menjauhkannya dari dominasi Arab Saudi. (Haaretz & Reuters, 2017)

Dengan Riyadh, Negara Qatar menjalin hubungan dengan Iran, Amerika Serikat, dan baru-baru ini Rusia. Salah satu pangkalan militer AS di Teluk ada di Qatar. Sementara, belakangan, Badan Investasi Pemerintah Qatar setuju untuk menginvestasikan sahamnya sebesar US\$ 2.7 miliar ke perusahaan Rusia, *Rosneft Oil Co. PJSC*. Qatar dulunya adalah negara bawahan (*vassal state*) Arab Saudi. Namun, berkat kekayaan gas alamnya, ia berhasil melepaskan diri (dari dominasi Riyadh), kata Jim Krane, peneliti dari Baker Institute, Rice University di Houston, Texas.

Negara lainnya di wilayah menanti kesempatan untuk mempreteli sayap Qatar. Upaya itu pernah dilakukan pada tahun 1996, dalam bentuk kudeta terhadap emir saat itu, Hamad bin Khalifa Al Thani. Hasilnya, gagal. Dalam persidangan tahun 2000, dua pejabat senior Qatar yang diduga terlibat dalam penggulingan emir mengaku, Bahrain membantu mengorganisasi penggulingan pemerintah yang sah dibantu oleh Arab Saudi, demikian dilaporkan *BBC*.

Kala itu Emir tidak membangun jaringan pipa yang mengintegrasikan Qatar ke pasar para tetangganya di Teluk. Di sisi lain, pada saat itu negara-negara minyak tidak menganggap gas alam berguna. Fungsinya hanya untuk disuntikkan ke sumur minyak untuk meningkatkan tingkat ekstraksi. Hanya ada satu jaringan pipa yang dibangun, yakni proyek Dolphin yang menghubungkan *North Field* ke Uni Emirat Arab dan Oman, telah beroperasi pada kapasitas setengah sampai dua pertiga. Kontrak yang ditandatangani

tahun lalu harus memenuhi kuota yang ditetapkan. Sebagian besar gas alam Qatar mengalir ke pasar Asia dan Eropa.

Krisis diplomatik Qatar menjadikan kawasan Timur Tengah jauh dari kata kondusif. Negara-negara yang dimotori Arab Saudi ramai-ramai memutuskan hubungannya dengan Qatar. Pengamat politik Timur Tengah, Ali Munhanif menjelaskan penyebab Qatar dimusuhi. Negara tersebut dianggap memiliki kekuatan ekonomi politik baru di Timur Tengah. Beliau juga mengatakan sikap politik internasional Qatar terkadang berbeda dengan negara-negara Arab lainnya, Misalnya keberpihakan Qatar kepada Iran. Negeri Para Mullah kerap berbeda pandangan politik dengan negara Timur Tengah lain. Beberapa kali Iran menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan Saudi. Karena sikap politik Qatar tersebut, beliau melihat tindakan tersebut sebagai pemicu kekhawatiran negara-negara Arab. Kecemasan ini mereka nilai dapat mengancam eksistensi sistem monarki konservatif. (Egehem, 2017)

Secara utama Qatar dikhawatirkan memiliki rezim konservatif di Teluk, jika semisalnya dibiarkan, Qatar akan mendorong adanya Arab Spring jilid dua. Sudah ada sembilan negara memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Awalnya adalah negara pimpinan Raja Salman, yaitu Arab Saudi yang terlebih dahulu yang memusuhi Qatar. Dan negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman, Libya, Maladewa, Mauritius, dan Mauritania mengambil langkah serupa. Semua negara ini memiliki alasan serupa memutus hubungan diplomatik dengan negara kecil itu, yakni untuk melindungi rakyatnya dari terorisme dan ekstremisme.

Pada tanggal 5 Juni, empat negara di Timur Tengah yakni Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Alasannya, Qatar dituduh membiayai para teroris. Para diplomat Qatar diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan negara-negara Teluk tersebut. Tak hanya memutuskan hubungan diplomatik, empat negara itu juga memblokade Negara Qatar di wilayah udara. Pesawat Qatar Airways dilarang melewati wilayah udara dari keempat negara itu. Oleh sebab itu, rute penerbangan Qatar

Airways pun berubah dan harus berputar ke arah Negara Iran, yang menjadi pintu satu-satunya untuk masuk ke Qatar.

Agar Qatar terlepas dari blokade, negara Teluk tersebut mengajukan 13 permintaan. Mereka meminta Qatar untuk memutuskan hubungan dengan semua organisasi teroris dan sektarian seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, al-Qaeda dan lainnya, termasuk menghentikan semua pendanaan bagi individu atau kelompok yang dianggap teroris oleh negara-negara Teluk tersebut. Qatar juga harus menyerahkan tokoh-tokoh teroris yang menjadi buronan Arab Saudi cs, membekukan aset mereka dan memberikan informasi seperti tempat tinggal hingga informasi keuangan dari para buronan kepada Arab Saudi cs. Tak hanya itu, Qatar juga diminta agar tidak memberikan kewarganegaraan kepada buronan arab Saudi.

Pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran yang menjadi pintu masuk ke Qatar juga masuk dalam daftar permintaan negara-negara Teluk. Iran adalah musuh bebuyutan Arab Saudi sehingga negara Teluk meminta Qatar untuk mengusir Garda Revolusi Iran dan memutus hubungan kerja sama militer dan meminta Qatar untuk menjalankan perdagangan yang dengan memperhatikan sanksi Dewan Keamanan PBB bagi Iran. Tak hanya Iran, Negara Teluk juga meminta Qatar menghentikan kerjasama militer dengan Turki dan menutup pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Kantor berita Al Jazeera juga harus ditutup, termasuk beberapa Kantor Berita lainnya yang didanai Qatar seperti Arabi21, Al Araby, Middle East Aye dan lainnya. (Debora, 2017)

Menurut Analis Frank Gardner, hanya ada dua pilihan bagi Qatar yaitu Qatar menerima semua permintaan dan kembali ke kumpulan negara Teluk atau memberontak dan menolak permintaan itu dengan konsekuensi diusir dari GCC, diblokade negara Teluk tetapi mungkin di sisi lain akan menguatkan hubungannya dengan Iran dan Turki. Jika dilihat dari daftar permintaan Arab Saudi tersebut, sudah tentu akan membuat Qatar keberatan. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Tani dari Qatar mengungkapkan bahwa

permintaan itu dibuat untuk ditolak. Selain itu, permintaan negara Teluk tersebut juga dianggap tidak masuk akal dan di sisi lain melanggar kedaulatan Qatar.

Menurut Hukamnas ada beberapa penyebab Negara-negara Teluk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar yaitu salah satunya karena negara Qatar mendukung Iran, Qatar dituding mendukung ekstremisme dan Terorisme, pidato Emir, berita palsu di media, Qatar memiliki ekonomi politik yang berbeda, kunjungan Donald Trump, konflik Palestina (hukamnas, 2017).

Negara Qatar yang telah mendukung Iran sudah bukan rahasia umum lagi jika Arab Saudi dan Iran merupakan musuh bebuyutan yang sangat mustahil kelak menjadi negara tetangga yang akrab dan bersahabat. Negara Iran tetap dekat dengan Qatar meskipun berbeda aliran, Qatar yang merupakan suni dan Iran yang merupakan Syiah. Ini menunjukkan bahwa pokok permasalahan antara Iran dan Arab Saudi bukanlah masalah Suni-Syiah. Qatar yang dituding oleh Arab Saudi mendukung agenda-agenda Iran.

Dengan di isolasikannya Qatar, Iran membantu Qatar dengan menyokong kebutuhan pangan. Dengan mengirimkan sekitar 100 ton buah dan sayuran. Bukan hanya itu, Iran juga mengirimkan setidaknya sekitar 66 ton daging. Dan berencana mengirimkan 90 ton daging. Sebelum embargo pemutusan hubungan, Qatar memang mengimpor bahan pangan dari negara-negara teluk lain untuk memenuhi kebutuhan pangan Qatar. Karena sebagian besar wilayah Qatar merupakan gurun pasir.

Qatar dituding mendukung ekstremisme dan terorisme, setelah tudingan mendukung terorisme, negara negara pro Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir diplomat Qatar untuk keluar dari negaranya. Doha telah dituding mendanai kegiatan kegiatan terorisme. Qatar dituding telah merangkul kelompok terorisme yaitu Kelompok Hamas, Ikhwanul Muslimin, Daesh (ISIS) dan Al-Qaida dengan biaya hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Qatar. Dengan tudingan itu pula maka Negara-negara musuh Qatar mengatakan Doha menganut Islam garis keras. Namun Qatar

membantah keras tudingan tudingan tersebut, Qatar menyatakan bahwa negaranya anti-terorisme. Dan usahanya melawan terorisme lebih kuat dari negara-negara tetangganya. Namun dengan terang terangan Qatar telah mendukung aliansi Hamas yang memporak porandakan kawasan Timur Tengah.

Dalam pidato Emir yang menyatakan tentang dukungannya terhadap Hamas dan Ikhwanul Muslimin menambah kisruh pergelakan Qatar. Dalam pidatonya Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dengan terang – terangan menyatakan dukungannya kepada dua kelompok itu yang akhirnya menimbulkan pernyataan bahwa Qatar mendukung aliansi–aliansi terorisme termasuk ISIS dan Al-Qaeda.

Berita Palsu di Media, ketegangan di beberapa negara di Timur Tengah pada Qatar bermula saat adanya berita dari Kantor Berita Qatar, *Qatar News Agency*. Dikarenakan dalam tulisan tersebut menyebutkan bahwa Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, berpidato yang isinya menyatakan bahwa Iran memiliki kekuatan besar. Secara tidak langsung pidato Emir menyatakan dukungannya pada Iran. Namun, Qatar membantah. Dengan pembelaan bahwa *Qatar News Agency* telah diretas dengan membawa nama Emir. Bantahan tersebut tidak dihiraukan oleh negara Timur Tengah yang lain karena telah menimbulkan ketegangan politik. Qatar menyebutkan bahwa negara yang menjadi sekutu Arab Saudilah yang mencoba meretas *Qatar News Agency* dengan menuliskan berita palsu agar terlihat seolah olah Qatar memang bersalah. Padahal yang tertulis hanya penggalan dari pidato Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani di pangkalan Militer.

Qatar memiliki ekonomi politik yang berbeda, alasan lain yang membuat Qatar terisolasi di Timur Tengah yaitu sistem ekonomi politik Qatar yang tidak sejalan dengan Arab Saudi. Hal ini menjadikan Qatar sebagai ancaman stabilitas regional. Ditambah dengan Qatar yang semakin memperlebar sayap perekonomiannya. Stabilitas ekonomi Qatar semakin memuncak positif, termasuk dengan perhelatan Piala Dunia 2022, Qatar menjadi penyelenggara di acara paling bergengsi

sedunia. Bukan hanya itu Qatar juga memiliki *Qatar Airways* dan telah berhasil mengembangkan stasiun *Al-jazeera*. Sebenarnya jika ditinjau lebih jauh konflik antara Qatar dan Saudi, kita mendapatkan hal-hal yang nampak jelas bahwa ini juga berhubungan dengan melesatnya perekonomian Qatar. Karena konflik konflik yang muncul di daerah Timur Tengah berdasar pada kekayaan atau ekonomi yang dimiliki. Alasan yang lain hanyalah alasan semu untuk menyembunyikan ketegangan yang sebenarnya.

Kunjungan Donald Trump, salah satu penyebab konflik Qatar yaitu adanya kunjungan dari presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Suasana makin diperkeruh setelah kedatangan Donald Trump ke Riyadh, kepulauan presiden Amerika Serikat inilah yang membuat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Qatar kian memanas. Qatar dituding menolak atau keluar dari kesepakatan yang telah ditentukan dengan Amerika Serikat. Negara negara itupun mulai geram dengan Qatar. Politikus politikus AS mengancam segera memindahkan pangkalan militer mereka dari Qatar ke Yordania. Ditambah dengan tuduhan Washington terhadap undang undangan anti terorisme yang masih lemah di kawasan Timur Tengah dengan menyudutkan Qatar.

Dalam konflik Palestina, Qatar dengan jelas memberi dukungan pada Hamas. Hamas dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh Israel setelah dituduh memporak porandakan kawasan palestina, Hamas yang sebenarnya mendapat kekuasaan di Gaza. Hanya Qatar yang masih bertahan untuk membela hamas. Dengan melindungi hamas di Doha. Hal ini semakin membuat negara-negara yang berseteru dengan Qatar menyatakan bahwa Qatar memang sangat mendukung dan mendanai kelompok-kelompok terorisme termasuk Hamas.

B. Pemutusan Negara – Negara Teluk terhadap Qatar

Pada Tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Yaman, Mesir, Maladewa, dan Bahrain secara terpisah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Seluruh negara yang terlibat memerintahkan warganya keluar dari Qatar. Tiga negara Teluk (Arab Saudi, UEA, Bahrain) memberi waktu dua minggu bagi pengunjung dan warga Qatar untuk meninggalkan negara mereka. Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa semua diplomat Qatar di Bahrain harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. Negara Qatar dikeluarkan dari intervensi pimpinan Arab Saudi di Yaman, Kuwait dan Qatar tetap netral. (Kompas.com, 2017)

Negara Arab Saudi dan UEA memberitahu pelabuhan dan agen perkapalan untuk tidak menerima kapal Qatar milik perusahaan atau perorangan Qatar. Negara Arab Saudi menutup perbatasan dengan Qatar, Iran mengirim kargo makanan ke Qatar Arab Saudi membatasi wilayah udaranya bagi Qatar Airways. Sebagai gantinya, Negara Qatar telah mengalihkan penerbangannya ke Afrika dan Eropa melalui Iran. Bank sentral Arab Saudi mendesak perbankan untuk tidak bertransaksi dengan bank Qatar dan riyal Qatar. Bahkan mengenakan kaos FC Barcelona bisa mengakibatkan pemakainya dikenakan denda atau dipenjara di Arab Saudi, karena klub tersebut disponsori oleh Qatar Airways.

Akibat pemutusan hubungan diplomatik ini, kesulitan untuk memasok kebutuhan ke Qatar berkembang dengan cepat. Dua sumber pelaku perdagangan di Timur Tengah mengatakan adanya ribuan truk pembawa makanan yang terjebak di perbatasan Saudi karena tak diperbolehkan melintas memasuki Qatar. Selama ini, sekitar 80% kebutuhan makanan Qatar bersumber melalui beberapa negara tetangga di Teluk Arab. Sumber perdagangan mengatakan kemungkinan bakal terjadi kekurangan makanan di Qatar hingga krisis hubungan diplomatik mereda. Apabila Qatar mengalami kekurangan bahan makanan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir berpotensi mengalami aksi pembalasan. Ketiga negara itu rentan terhadap pembalasan, karena selama ini sangat

bergantung pada Qatar untuk mendapat pasokan gas alam cair. (kumparanNEWS, 2017).

Mediator Kuwait di Riyadh mengajukan daftar tuntutan Saudi ke Qatar. Tuntutan tersebut termasuk memutuskan semua hubungan dengan Iran dan mengusir anggota residen Hamas dan Ikhwanul Muslimin, mengekang kebebasan al-Jazeera, menghentikan "campur tangan" urusan luar negeri dan menghentikan pendanaan atau dukungan untuk organisasi-organisasi teroris. Sampai dengan tanggal 10 Juni 2017, sembilan pemerintahan yang berdaulat dan satu pemerintah *de facto* telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Enam negara teluk memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa negara ini mensponsori terorisme. Langkah ini dipandang sebagai postur negara Sunni di kawasan yang makin agresif terhadap kekuatan Syiah Iran, terutama setelah lawatan Presiden Trump ke Arab Saudi bulan lalu. Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi dan enam negara lainnya membuat kawasan Timur Tengah dan dunia Islam kembali menjadi sorotan dunia.

Qatar yang sedang terkenal dengan menjadi penyelenggara Piala Dunia 2022, kini dituduh oleh Arab Saudi sebagai negara yang mendukung gerakan terorisme. Secara khusus, Arab menyebut Qatar mendukung gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin (IM) dan Hamas serta memiliki hubungan spesial dengan Iran yang mana hal tersebut mengancam stabilitas keamanan dikawasan. Untuk itulah kemudian Negara Arab Saudi mengajak negara di kawasan untuk ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Tercatat saat ini UEA, Bahrain, Yaman, Libya, Mesir, dan Maladewa, ikut memutus hubungan diplomatik, termasuk di dalamnya memutus hubungan darat, laut dan udara. Langkah ini menimbulkan gangguan transportasi seperti umrah ke Kota Mekkah yang melalui Qatar.

Dampak dari krisis di Timur Tengah ini terus meluas, dalam bidang kemanusiaan, banyak warga keturunan Qatar yang tinggal di luar Qatar mengalami kebingungan perihal

yang harus diperbuat. Munculnya ultimatum untuk mengusir warga Qatar dalam waktu 14 hari justru menimbulkan krisis kemanusiaan tersendiri. Saat ini, banyak warga negara Qatar yang menikah dengan warga negara dari negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik.

Dalam bidang keamanan, dampak dari Krisis Teluk akibat Negara Qatar ini, disebut oleh Menteri Luar Negeri Jerman, dapat memicu perang. Terlibatnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Prancis, Iran, dan beberapa negara lain membuat persoalan menjadi semakin runyam. Sebagai contoh, tindakan Negara Iran yang mengirimkan kapal perang ke Oman yang kemungkinan meningkatkan ketegangan. (Haryanto, 2017).

Dengan terjadi peristiwa ini, terjadi pasar saham merosot, kenaikan harga minyak mentah, penutupan perbatasan, penghentian rute penerbangan multinasional, terjadinya kepanikan masyarakat melakukan pembelian komoditas supermarket. Piala Dunia FIFA 2022, juga mungkin bisa terpengaruh. Negara Teluk Qatar, 5 Juni adalah hari bencana, Bahrain, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, pemerintah militan di Libya Timur yang belum diakui secara internasional, secara berturut-turut mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan Qatar. Kemudian negara kepulauan di Asia Selatan Maladewa, negara kepulauan Afrika Timur Mauritius dan negara Afrika Barat Senegal bergabung dengan badai pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Yordania, yang biasa melakukan politik penyeimbang diplomatic, mengumumkan akan mengurangi tingkat representasi diplomatiknya di Qatar, dan juga akan mencabut izin operasi TV Al Jazeera di Yordania. Arab Saudi dan negara-negara yang disebutkan diatas ini, menuduh Qatar mempunyai hubungan dengan Iran, dan melindungi kekuatan teroris, hal ini seolah suatu Gempa Bumi di Timur Tengah. Jerman menyebutkan insiden ini merupakan krisis diplomatik paling parah di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dari semua negara yang mengumumkan putusnya hubungan dengan Qatar, Arab Saudi adalah negara yang mengambil tindakan paling keras. Dengan menghentikan

semua penerbangan-penerbangan sipil menuju Qatar, dan menerapkan blokade angkatan laut dan darat, melarang semua mobil dan kapal di Arab Saudi membawa penumpang atau kargo ke Qatar. Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang berbatasan darat dengan Qatar. Sebelum ini, sebagian besar makanan Qatar dan produk ternak dan pertanian diangkut melalui Arab Saudi ke Qatar. Setelah Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka menutup perbatasan dengan Qatar, Qatar menjadi sangat terisolasi.

Seorang ilmuwan politik Saudi mengatakan bahwa alasan mendasar mengapa Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah komprehensif seperti itu karena kebijakan luar negeri Qatar telah melampaui batas bawah (botom line) Arab Saudi. Analisis politik Arab Saudi, Hani Wafa mengatakan: Dalam banyak pernyataannya baru-baru ini, Qatar telah mengakui memiliki hubungan yang erat dengan Iran. Ini benar-benar bertentangan dengan kebijakan Arab Saudi dan banyak negara lainnya. Selain itu, Arab Saudi juga percaya bahwa Qatar telah memberikan dukungan kepada Iran dan Syiah di Qatif, yang berada di Arab Saudi timur. Ini adalah isu utama bagi Arab Saudi. (theguardian, saudi arabias power play leaves qatar with little room for manouvre, 2017).

Arab Saudi telah lama memandang Iran sebagai musuh utama regional. Pada bulan Januari 2016, Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran karena warga Iran menyerang konsulat Saudi di Iran. Bulan lalu, saat kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi, Arab Saudi menganjurkan pembentukan "pusat global untuk memerangi ideologi ekstremis," yang dipandang sebagai salah satu langkah baru Arab Saudi yang bekerjasama dengan AS untuk menentang Iran.

Pada saat Emir Qatar, yang menghadiri KTT Arab-Islam-Amerika di ibukota Arab Saudi, Riyadh, ia tidak menghadiri upacara pendirian pusat tersebut. Dan pertemuan puncak ini yang diikuti lebih dari 50 pemimpin Arab. Trump dan Raja Arab Saudi berbagi sikap dan bersatu terhadap pandangan mereka terhadap Iran. Dalam pidatonya saat itu Trump mengatakan Saya berdiri di hadapan Anda, namun

diskusi tidak lengkap jika ancaman ini tidak mencakup menyebutkan/stamping out pemerintah ini yang telah memberi tiga macam kepada teroris: perlindungan, dukungan finansial, dan status sosial yang dibutuhkan untuk perekrutan. Ini adalah rezim yang bertanggung jawab atas ketidak-stabilan di kawasan ini, tentu saja yang saya maksud ini adalah Iran. (theguardian, saudi arabia and bahrain break diplomatic ties with qatar over terrorism, 2017).

Padahal Emir Qatar menghadiri pertemuan puncak, dan juga mengadakan pertemuan dengan Trump, namun saat itu dia tidak mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pidato Trump atau bahwa dia tidak setuju dengan menentang terorisme. Pertemuan ini dilihat oleh Arab Saudi, bahwa ini membuktikan Qatar menyetujui pidato Trump. Setelah pidato Trump, Arab Saudi memobilisasi negara-negara Muslim yang menghadiri pertemuan tersebut untuk menerbitkan sebuah Deklarasi Riyadh, yang sebenarnya mengulangi pokok-pokok utama pidato Trump. Dalam deklarasi ini juga termasuk Qatar.

Jadi ketika terjadi insiden peretasan, Arab Saudi percaya bahwa Qatar berbalik pada kata-katanya. Apa yang memprovokasi adalah bahwa tindakan pemutusan hubungan dengan Qatar persis hampir bersamaan dengan negara-negara ini. Hal ini membuat pihak lain tidak bisa tidak menduga apakah pemutusan hubungan ini sudah direncanakan sebelumnya. Sebenarnya menurut para analis Timteng, konflik dan prasangka antara negara-negara Arab dan Qatar, sudah ada sejak lama. Konflik dan sentimen semacam ini yang dapat juga disebutkan prasangka, sudah berangsur-angsur terakumulasi. Maka ketika masalah sensitif semacam Hackergate ini terjadi, mereka akan segera membuat keputusan terpadu dalam hitungan menit. Jika menyangkut masalah beginian, mereka tidak perlu membahasnya terlalu banyak, sungguh-sungguh, atau secara komprehensif. Mereka hampir tidak membutuhkan sinyal, bahkan hanya cukup dengan hubungan per telepon, masalahnya sudah bisa diputuskan.

C. Bentuk Dukungan Turki Terhadap Qatar

Turki siap mendukung Qatar melawan negara-negara Teluk Arab. Dukungan itu merupakan bentuk pelaksanaan atas disetujuinya RUU Turki yang memungkinkan pasukan militer Erdogan mendukung Qatar. Keputusan itu sebagai dukungan Turki terhadap pemerintahan Qatar. Persetujuan RUU itu mendapat dukungan 240 suara. Dukungan terbesar dari Partai AK yang berkuasa dan oposisi nasionalis MHP. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam Arab Saudi. Erdogan menyebut sikap Raja Arab merupakan tindakan yang tidak tepat dan melanggar kedaulatan Qatar. Erdogan menyatakan, Turki akan terus membina hubungan dengan Qatar dan sanksi terhadap Qatar bukanlah sebuah solusi. (Tagar, 2017).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat dengan legislasi mengenai pengerahan pasukan Turki ke Qatar. Langkah ini disebut bantuan dukungan dari Turki untuk negara yang tengah dilanda krisis diplomatik tersebut. Proses legislasi tersebut rampung usai dipublikasikan media resmi pemerintah, menyusul pengumuman dari Kantor Presiden. Undang-undang tersebut baru ditujukan oleh parlemen pada Rabu lalu Erdogan langsung menyetujuinya.

Setelah pengerahan awal pasukan Turki di sebuah pangkalan di Doha, pesawat tempur dan kapal perang juga ikut dikirimkan. Menurut berita Hurriyet menuliskan bahwa jumlah pesawat tempur dan kapal perang Turki yang akan dikirim ke pangkalan dipastikan usai mempersiapkan laporan berdasarkan peninjauan awal di sana. Sementara itu, Ankara akan mengirim delegasi ke Qatar dalam beberapa hari mendatang. Mereka akan ke pangkalan untuk meninjau situasi di sana. Diperkirakan ada sekitar 200 hingga 250 tentara dalam waktu dua bulan di tahap awal.

Erdogan juga disebutkan menyepakati perjanjian latihan militer bersama antara Turki dengan Qatar. Kedua undang-undang disusun sebelum krisis diplomatik yang

dialami Qatar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada awal pekan ini, menudingnya mendukung militan Islamis dan musuh bebuyutan kawasan, Iran. Beberapa negara mengikuti langkah itu sementara Doha menampik tuduhan tersebut.

Alasan Turki mendukung Qatar dalam konflik diplomatic, yaitu: Pertama, kedua negara mengambil posisi mendukung dengan setia Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Kedua, Turki ingin bebas bermain-main dengan Iran, tanpa intervensi adanya stigma negatif atau larangan terhadap sikapnya itu, terutama dari sesama negara Sunni. Disamping itu, Turki tidak hanya terkait dalam dukungannya terhadap Qatar mengingat Ankara juga melakukan sejumlah langkah demi membantu Doha. Salah satunya dengan pengerahan pasukan Turki serta mengirim pasokan makanan dan air ke Qatar. (Julio, 2017)